



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : 602/KPN.W4-U5/SK.RA1.10/XI/2024

**TENTANG
REVISI KE-1 (SATU)
RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa telah ditetapkan Revisi Ke-1 (satu) Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2024;
2. Bahwa untuk mendorong tercapainya target kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2024;
3. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama; dan
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Revisi Ke-1 (satu) Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG RENCANA
AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2024.
- Pertama : Revisi Ke-1 (satu) Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan dokumen
yang memuat rencana aksi dan rencana pemantauan (monitoring dan evaluasi)
dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai
Kelas IA Tahun 2024.
- Kedua : Setiap unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkewajiban
untuk melaksanakan Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
Tahun 2024 yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 18 November 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
Nomor : 602/KPN.W4-U5/SK.RA1.10/XI/2024
Tanggal : 18 November 2024

REVISI KE-1 (SATU)
RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2024

1. KINERJA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				POTENSI RISIKO	RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN RISIKO	RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	92	20	30	30	12	Penyelesaian relaas delegasi memerlukan waktu yang relatif lama.	Melakukan monitoring dan koordinasi yang intensif terhadap pelaksanaan relaas delegasi yang disampaikan kepada Pengadilan yang dimohonkan bantuan delegasi.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5	-	-	5	-	Tidak adanya perkara pidana narkoba yang diputus dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>).	Mendorong para Hakim untuk memeriksa dan meneliti secara mendalam terhadap penyelesaian perkara pidana narkoba yang dapat memenuhi	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
Nomor : 602/KPN.W4-U5/SK.RA1.10/XI/2024
Tanggal : 18 November 2024

REVISI KE-1 (SATU)
RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2024

1. KINERJA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				POTENSI RISIKO	RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN RISIKO	RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	92	20	30	30	12	Penyelesaian relaas delegasi memerlukan waktu yang relatif lama.	Melakukan monitoring dan koordinasi yang intensif terhadap pelaksanaan relaas delegasi yang disampaikan kepada Pengadilan yang dimohonkan bantuan delegasi.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5	-	-	5	-	Tidak adanya perkara pidana narkoba yang diputus dengan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>).	Mendorong para Hakim untuk memeriksa dan meneliti secara mendalam terhadap penyelesaian perkara pidana narkoba yang dapat memenuhi	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				POTENSI RISIKO	RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN RISIKO	RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									unsur penerapan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>).					
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	92	15	30	25	22	Adanya upaya hukum banding oleh pihak yang berperkara terhadap perkara yang diputus.	Menyelesaikan dan memutus perkara secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	94	14	30	30	20	Adanya upaya hukum kasasi oleh pihak yang berperkara terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding.	Menyelesaikan dan memutus perkara di Pengadilan Tingkat Pertama secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	30	-	-	30	-	Keengganan masyarakat atau pihak korban untuk mencapai kesepakatan bersama atau perdamaian dalam penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum.	Mendorong tercapainya kesepakatan bersama atau perdamaian dalam pelaksanaan diversi dan mengedukasi masyarakat atau pihak korban terkait perlindungan dan kesejahteraan anak.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas	90	10	20	25	35	Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan.	Mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				POTENSI RISIKO	RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN RISIKO	RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
									unsur penerapan pendekatan keadilan restoratif (<i>restorative justice</i>).					
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	92	15	30	25	22	Adanya upaya hukum banding oleh pihak yang berperkara terhadap perkara yang diputus.	Menyelesaikan dan memutus perkara secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	94	14	30	30	20	Adanya upaya hukum kasasi oleh pihak yang berperkara terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding.	Menyelesaikan dan memutus perkara di Pengadilan Tingkat Pertama secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	30	-	-	30	-	Keengganan masyarakat atau pihak korban untuk mencapai kesepakatan bersama atau perdamaian dalam penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum.	Mendorong tercapainya kesepakatan bersama atau perdamaian dalam pelaksanaan diversi dan mengedukasi masyarakat atau pihak korban terkait perlindungan dan kesejahteraan anak.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas	90	10	20	25	35	Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan.	Mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				POTENSI RISIKO	RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN RISIKO	RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
		terhadap layanan peradilan.												
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	25	25	25	25	Kelalaian petugas dalam menyampaikan salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.	Melakukan monitoring melalui SIPP dan pencatatan di buku bantu.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4	-	-	4	-	1. Keengganan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama atau perdamaian dalam penyelesaian masalah. 2. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama dalam proses mediasi.	1. Melakukan edukasi melalui <i>public campaign</i> dan mendorong masyarakat untuk dapat mencapai kesepakatan bersama atau perdamaian dalam penyelesaian masalah. 2. Menyediakan mediator yang tersertifikasi dan mempunyai kemampuan mediasi yang handal.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				POTENSI RISIKO	RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN RISIKO	RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
		terhadap layanan peradilan.												
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	25	25	25	25	Kelalaian petugas dalam menyampaikan salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.	Melakukan monitoring melalui SIPP dan pencatatan di buku bantu.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4	-	-	4	-	1. Keengganan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama atau perdamaian dalam penyelesaian masalah. 2. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama dalam proses mediasi.	1. Melakukan edukasi melalui <i>public campaign</i> dan mendorong masyarakat untuk dapat mencapai kesepakatan bersama atau perdamaian dalam penyelesaian masalah. 2. Menyediakan mediator yang tersertifikasi dan mempunyai kemampuan mediasi yang handal.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				POTENSI RISIKO	RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN RISIKO	RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
	miskin dan terpinggirkan.	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	92	17	25	25	25	1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi terkait adanya layanan bantuan hukum di Pengadilan. 2. Kekhawatiran terhadap adanya pungutan biaya layanan.	1. Melakukan publikasi dan sosialisasi layanan bantuan hukum. 2. Melakukan publikasi layanan tanpa biaya (gratis) kepada masyarakat.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	60	-	-	30	30	1. Terjadinya upaya perlawanan (<i>derden verzet</i>) terhadap perkara yang akan dieksekusi. 2. Terjadinya upaya penghalangan pelaksanaan eksekusi di lokasi.	1. Melakukan percepatan penyelesaian perkara perlawanan (<i>derden verzet</i>). 2. Melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dalam pengamanan pelaksanaan eksekusi.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				POTENSI RISIKO	RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN RISIKO	RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB
				I	II	III	IV			I	II	III	IV	
	miskin dan terpinggirkan.	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	92	17	25	25	25	1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi terkait adanya layanan bantuan hukum di Pengadilan. 2. Kekhawatiran terhadap adanya pungutan biaya layanan.	1. Melakukan publikasi dan sosialisasi layanan bantuan hukum. 2. Melakukan publikasi layanan tanpa biaya (gratis) kepada masyarakat.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	60	-	-	30	30	1. Terjadinya upaya perlawanan (<i>derden verzet</i>) terhadap perkara yang akan dieksekusi. 2. Terjadinya upaya penghalangan pelaksanaan eksekusi di lokasi.	1. Melakukan percepatan penyelesaian perkara perlawanan (<i>derden verzet</i>). 2. Melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian dalam pengamanan pelaksanaan eksekusi.	April	Juli	Oktober	Desember	Panitera

2. KEGIATAN DAN ANGGARAN

PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1. Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.03.400328.BF)	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	1. Koordinasi	Percepatan Penyelesaian Perkara	Dukungan Penyelesaian Perkara	2 Kegiatan	1.500.000	100	-	50	-	50	Apr	Jul	Okt	Des	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel
		2. Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Pidana yang Diselesaikan	1. Pendaftaran Berkas Perkara	390 Perkara	65.520.000	100	25	25	30	20	Apr	Jul	Okt	Des	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
				2. Penetapan Hari Sidang	11 OK	770.000	100	50	50	-	-	Apr	Jul	Okt	Des	
				3. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	14 Perkara	930.000	100	50	50	-	-	Apr	Jul	Okt	Des	
				4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	3.480 OK	104.400.000	100	20	30	30	20	Apr	Jul	Okt	Des	
				5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa	57 Perkara	3.990.000	100	50	50	-	-	Apr	Jul	Okt	Des	
				6. Minutasi/Upaya Hukum	370 Perkara	11.100.000	100	20	30	30	20	Apr	Jul	Okt	Des	

2. KEGIATAN DAN ANGGARAN

PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1. Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.03.400328.BF)	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	1. Koordinasi	Percepatan Penyelesaian Perkara	Dukungan Penyelesaian Perkara	2 Kegiatan	1.500.000	100	-	50	-	50	Apr	Jul	Okt	Des	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel
		2. Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Pidana yang Diselesaikan	1. Pendaftaran Berkas Perkara	390 Perkara	65.520.000	100	25	25	30	20	Apr	Jul	Okt	Des	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
				2. Penetapan Hari Sidang	11 OK	770.000	100	50	50	-	-	Apr	Jul	Okt	Des	
				3. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	14 Perkara	930.000	100	50	50	-	-	Apr	Jul	Okt	Des	
				4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	3.480 OK	104.400.000	100	20	30	30	20	Apr	Jul	Okt	Des	
				5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa	57 Perkara	3.990.000	100	50	50	-	-	Apr	Jul	Okt	Des	
				6. Minutasi/Upaya Hukum	370 Perkara	11.100.000	100	20	30	30	20	Apr	Jul	Okt	Des	

PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	
				7. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	23 Perkara	1.090.000	100	20	30	30	20	Apr	Jul	Okt	Des	
				8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	44 Perkara	3.300.000	100	20	30	30	20	Apr	Jul	Okt	Des	
		3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	51 Orang	36.000.000	100	25	25	25	25	Apr	Jul	Okt	Des	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
2. Dukungan Manajemen (005.01.400327.WA)	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1. Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	4.791.645.000	100	20	40	20	20	Apr	Jul	Okt	Des	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel
				2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1.933.757.000	100	20	30	30	20	Apr	Jul	Okt	Des	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	
				7. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	23 Perkara	1.090.000	100	20	30	30	20	Apr	Jul	Okt	Des	
				8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	44 Perkara	3.300.000	100	20	30	30	20	Apr	Jul	Okt	Des	
		3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	51 Orang	36.000.000	100	25	25	25	25	Apr	Jul	Okt	Des	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
2. Dukungan Manajemen (005.01.400327.WA)	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan 1 Layanan	4.791.645.000 1.933.757.000	100 100	20 20	40 30	20 30	20 20	Apr Apr	Jul Jul	Okt Okt	Des Des	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan

PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp.)	TARGET CAPAIAN TAHUNAN (%)	RENCANA AKSI TERHADAP TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)				RENCANA PEMANTAUAN CAPAIAN (MONITORING & EVALUASI) PER TRIWULAN				SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
								I	II	III	IV	I	II	III	IV	
																Penyelesaian Perkara 3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan



Dumai, 18 November 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,